

LKPJ
2019



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2019

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Memenuhi amanat pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian ditegaskan ditegaskan dalam pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Padang, Januari 2020
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat



MASWAR DEDI. AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001

**PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

BAB I

PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, di Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal.

A. Capaian Pelaksanaan Program

Untuk mendukung Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2019, dialokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 12.189.686.045,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.946.723.739,- (98,01%), dengan laporan sebagai berikut :

Urusan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2019, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Program, sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp. 1.376.910.625,- dan realisasi sebesar Rp. 1.365.594.255,- (99,18%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp. 599.642.261,- dan realisasi sebesar Rp. 587.792.728,- (98,02%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp. 44.460.000,- dan realisasi sebesar Rp. 44.460.000,- (100%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp. 977.974.300,- dan realisasi sebesar Rp. 905.923.540,- (92,63%).

- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp. 529.206.259,- dan realisasi sebesar Rp. 518.036.469,- (97,89%).
- 6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan anggaran Rp. 4.442.420.010,- dan realisasi sebesar Rp. 4.371.369.725,- (98,40%), dengan output : **Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN.**
- 7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan anggaran Rp. 4.219.072.570,- dan realisasi sebesar Rp. 4.153.546.159,- (98,45%), dengan output dari program ini adalah :
 - **Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu, dengan target 82%.**
 - **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target rasio 3,35.**

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program
Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.376.910.625,00	1.365.594.255,00	99,18 %
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	599.642.261,00	587.792.728,00	98,02 %
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.460.000,00	44.460.000,00	100,00 %
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	977.974.300,00	905.923.540,00	92,63 %
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	599.206.259,00	518.036.469,00	97,89 %
VI.	Program Pengembangan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	4.442.420.010,00	4.371.369.725,00	98,40 %
VII.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu	4.219.072.570,00	4.153.546.159,00	98,45 %
TOTAL		12.189.686.045,00	11.946.723.739,00	98,01 %

B. Outcome

Dengan dilaksanakannya Program yang mendukung Penanaman Modal, pada tahun 2019 telah didapat hasil setelah pelaksanaan program diantaranya :

- 1) Untuk Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Sumatera Barat, dengan indikator :
 - **Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN**, pada tahun 2019 nilai realisasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp. 4.280.630.800.000,00 dengan capaian sebesar 98,22% dari target sebesar Rp. 4.358.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2018 sebesar Rp. 4.732.165.580.000,00, ada penurunan sebesar 9,54% atau sebesar Rp. 451.534.780.000,00. (kondisi triwulan 3, karena kondisi triwulan 4 masih menunggu press realease resmi dari BKPM RI)
- 2) Untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu di Provinsi Sumatera Barat, dengan indikator :
 - **Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu**, pada tahun 2019 persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu adalah sebesar 82,51% dengan capaian sebesar 100,62% dari target sebesar 82%. Jika dibandingkan dengan persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu tahun 2018 sebesar 84,10% ada penurunan sebesar 1,89% atau sebesar 1,59%.
 - **Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**, pada tahun 2019 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar 3,27 dengan capaian sebesar 97,61% dari target sebesar 3,35. Jika dibandingkan dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan tahun 2018 sebesar 3,27% tidak ada peningkatan.

C. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Barat, selain mengacu pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan juga dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan indikator kinerja daerah. Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

terdapat 2 (dua) indikator kinerja daerah untuk urusan Penanaman Modal yang ditetapkan guna memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan penanaman modal pada Tahun 2019. Adapun realisasi capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah RPJMD untuk Tahun 2019, dimaksud sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel Realisasi Capaian IKU
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2019		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	%
1.	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN *	4.358.000.000.000,-	4.280.630.800.000,-	98,22%

*Catt : * Kondisi Triwulan 3*

Berdasarkan data tabel capaian IKU RPJMD diatas, diketahui bahwa sebagian besar indikator yang ada capaian indikator pada Tahun 2019 belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD dengan capaian baru 98,22%. (kondisi triwulan 3, karena kondisi triwulan 4 masih menunggu press realease resmi dari BKPM RI)

D. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Penanaman Modal masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan, antara lain:

- a. Pelayanan terhadap penanaman modal (investor) masih belum optimal, disebabkan :
 - 1) Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, ini terlihat dari Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu dan hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang masih belum menunjukkan hasil yang membaik dibandingkan tahun 2018, antara lain disebabkan oleh :
 - a) Help Desk (meja pengaduan) yang tidak tersedia dan mudah dilihat pada ruang tunggu layanan;
 - b) Petugas Pengaduan yang tidak standby (berada setiap hari) di ruang layanan;

- c) Kompetensi petugas di FO yang masih kurang, yang seharusnya PNS yang sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan di posisi FO;
 - d) Petugas Administrator dan Pengawas yang tidak berada di ruangan layanan selama waktu pelayanan;
 - e) Tim Teknis PTSP yang masih berkantor di OPD teknis masing-masing.
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti area parkir sehingga kepuasan masyarakat dalam pengurusan Perizinan dan Non Perizinan belum optimal.
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kualitas yang ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang masih membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya dibidang Pelayanan.
- d. Perubahan Kebijakan Pemerintah terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang mengakibatkan perubahan prosedur penyelenggaraan Perizinan.
- e. Standar Operating Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang masih perlu dilakukan kajian dan perubahan dengan proses pertimbangan teknis dari OPD teknis terkait perubahan kebijakan dan aturan dari Kementerian Teknis terkait.
- f. Masih kurangnya infrastruktur berupa penyediaan dan perbaikan jalan, jaringan komunikasi dan ketersediaan energi.
- g. Masih belum sinerginya kebijakan dan program pengembangan investasi sesuai dengan sektor/subsektor dan komoditas yang berdaya saing tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan investasi dan penanaman modal, dapat disolusikan antara lain :

- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti area parkir sehingga kepuasan masyarakat dalam pengurusan Perizinan dan Non Perizinan belum optimal.
- b. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kualitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya dibidang Pelayanan.

- c. Melakukan Revisi terkait Standar Operating Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) atas kajian dan perubahan serta proses pertimbangan teknis dari OPD teknis terkait perubahan kebijakan dan aturan dari Kementerian Teknis terkait.
- d. Meningkatkan pelayanan infrastruktur berupa penyediaan dan perbaikan jalan, jaringan komunikasi dan ketersediaan energi.
- e. Mensinerginya kebijakan dan program pengembangan investasi sesuai dengan sektor/subsektor dan komoditas yang berdaya saing tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Penghargaan Nasional Yang Diterima

NO	URAIAN PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT NASIONAL	TINGKAT PROVINSI
1.	Penghargaan Pemerintah Daerah dalam Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019	Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan kategori " Baik " tahun 2019	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-
2.	Piagam Penghargaan SKPD Terinovatif	SKPD Terinovatif	-	Peringkat III SKPD Terinovatif Pemprov Sumbar
3.	Anugrah Keterbukaan Informasi Publik se – Sumatera Barat Tahun 2019	Badan Publik " CUKUP INFORMATIF" tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Badan Publik Cukup Informatif Kategori OPD

F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2018

Tidak Ada Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2018.

**PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN
DAN DEKONSENTRASI**

BAB II

PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

C. PROGRAM KEGIATAN YANG DITERIMA SERTA PELAKSANAANYA

I. PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Dasar Hukum.

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Peraturan BKPM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2019;
6. DIPA Nomor 065.01.3.0800.22/2019.

b. Program dan Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2019 mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI yang dilaksanakan dalam bentuk Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar sebesar **Rp. 515.369.000,-** (Lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dapat direalisasikan sebesar **Rp. 505.640.700,-** (Lima ratus lima juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah)

atau sebesar **98,11%** dengan output perusahaan yang terpantau perkembangan realisasi investasinya di Sumatera Barat sebanyak **76** (Tujuh puluh enam) perusahaan dari target **123** (Seratus dua puluh tiga) perusahaan dalam rangka Dekonsentrasi atau sebesar **62%**.

d. Outcome

Adapun outcome dari Program dan kegiatan ini adalah terlaksananya Pemantauan Perkembangan Realisasi Investasi dari target yang ditetapkan oleh BKPM RI sebesar **Rp. 11,24 Triliun** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 4,28 Triliun** atau sebesar **38%** (kondisi keadaan sampai dengan Triwulan 3).

e. Permasalahan dan Solusi

Rendahnya realisasi output disebabkan karena target output bertambah dari tahun sebelumnya, yaitu dari 117 perusahaan menjadi 123 perusahaan, sedangkan anggaran berkurang dari Rp. 616.876.000,- menjadi Rp. 515.369.000,-. Realisasi output ini sendiri tidak bisa ditingkatkan lagi karena realisasi anggaran sudah mencapai 98,11%. Solusi yang diharapkan adalah agar peningkatan target capaian output juga diiringi dengan peningkatan anggaran.

Capaian realisasi outcome yang masih 38% (**kondisi keadaan sampai dengan Triwulan 3**), diantaranya disebabkan oleh:

- Beberapa perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga menyebabkan belum maksimalnya perusahaan yang menyampaikan LKPM.
- Banyak perusahaan bidang usaha ketenagalistrikan yang belum merealisasikan investasinya karena belum ada kesepakatan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), sedangkan nilai rencana investasinya cukup besar. Hal ini menyebabkan peningkatan nilai target outcome sedangkan realisasi investasi rendah.

**PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAH DAERAH**

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Urusan Wajib Penanaman Modal

1. PROGRAM DAN KEGIATAN



Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program kerja dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan penanaman modal di daerah. Didalam mewujudkan program kerja dan perjanjian kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 ini mendapat dukungan dana sebesar Rp. 18.844.555.957,- dan telah direalisasikan sampai dengan keadaan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 18.287.327.007,- atau sebesar 97,04%. Untuk Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan untuk Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan PNS, dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah mendapat dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 6.654.869.912,- dengan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.345.836.501,- atau sebesar 95,28%. Sementara itu program kerja yang disusun dalam bentuk kegiatan, dimana rencana program kerja yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur, dialokasikan melalui Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Pokok dan Belanja Langsung Urusan dengan jumlah dana sebesar Rp. 12.189.686.045,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 11.946.723.739,- atau sebesar 98,01%. Adapun Program DPM & PTSP tahun anggaran 2019, adalah sebagai berikut:

- a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.1.376.910.625,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.365.594.255,- atau sebesar 96,24%.
- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 599.642.281,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 587.793.618,- atau sebesar 98,62%.
- c. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 44.460.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 44.460.000,- atau sebesar 100%.

- d. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 977.974.300,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 905.923.540,- atau sebesar 92,63%.
- e. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 529.206.259,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 518.036.469,- atau sebesar 98,31%.
- f. **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 4.442.420.010,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.371.369.725,- atau sebesar 96,04%.
- g. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu**, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 4.219.072.570,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.153.546.159,- atau sebesar 97,63%.

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

I. BELANJALANGSUNG POKOK

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor;
- 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah;
- 9. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur;
- 10. Penyediaan Makanan dan Minuman;

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Mebeuler;
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler;
6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
2. Penatausahaan Keuangan SKPD;
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD;
5. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD.

II. BELANJA LANGSUNG URUSAN

A. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat;
3. Kerjasama Promosi dan Misi Investasi;
4. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Gelar Potensi dan Temu Usaha;

1. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu;
3. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan;
4. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan;
5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
7. Penilaian Standar Mutu Perizinan.

B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

6. Promosi Investasi;
7. Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi;
8. Forum Investasi Sumatera Barat;
9. Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi;
10. Penyelesaian Permasalahan Investasi;
11. Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat;
12. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal;
13. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal;
14. Forum Komunikasi Usaha Daerah;

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN



ari program dan kegiatan yang telah disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2019 semua kegiatan dapat diselesaikan 100% dan dapat mencapai target kinerja output yang telah ditetapkan. Bahkan ada beberapa kegiatan yang kinerja outputnya melebihi target >100%,

Pencapaian pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Belanja Langsung Urusan sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Adapun Kegiatan-kegiatan untuk mendukung terwujudnya pencapaian target program ini, sebagai berikut :

1. **Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**, dukungan anggaran untuk kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah sebesar Rp. 165.358.360,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 164.726.425,- atau sebesar 99,62% dan realisasi fisik dapat tercapai 100%. Untuk Capaian kinerja kegiatan ini dari 20 target perusahaan yang dilakukan pengawasan ditahun 2019 dapat direalisasikan 29 perusahaan atau dengan kinerja sebesar 145%.

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah kegiatan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal serta Pemeriksaan yang dibarengi dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek perusahaan PMA/PMDN terkait dengan penerbitan izin usaha yang telah dikeluarkan terhadap perusahaan yang sudah memproduksi komersil dan telah merealisasikan investasinya minimal 75% dari rencana investasi serta proses pencabutan Surat Persetujuan/pembatalan izin usaha bagi perusahaan yang tidak pernah merealisasikan investasinya sama sekali dan tidak lagi memproduksi atau macet serta tidak diketahui keberadaanya dan tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

- Dengan demikian maksud dan tujuan dilaksanakan Pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN adalah agar penyimpangan yang dilakukan para penanam modal dapat diminimalisir sesuai ketentuan yang berlaku dan DPM & PTSP Provinsi tidak lagi mencatat data perusahaan yang tidak produktif sehingga data yang ada akan lebih baik serta diharapkan target realisasi investasi yang telah ditetapkan dapat dicapai.

- Keluaran dari kegiatan ini adalah:

Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN sebanyak 29 perusahaan (melebihi target), yaitu:

- 17 perusahaan sudah produksi
- 12 perusahaan masih dalam masa konstruksi

- Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah:

Dengan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dapat diketahui keadaan sebenarnya dilapangan terkait investasi yang dilakukan oleh investor, seperti:

1. Apakah perusahaan masih dalam keadaan konstruksi atau tahap pembangunan;
2. Apakah perusahaan sudah produksi komersil;
3. Apakah perusahaan dalam keadaan macet ataupun yang sedang bermasalah
4. Apakah perusahaan sedang menghadapi masalah atau melakukan penyimpangan dari peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. **Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat,** dukungan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat ini adalah sebesar Rp. 70.761.480,-. Dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 69.687.590,- atau (98,48%), dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.

- Maksud dari kegiatan Penyusunan Data Perkembangan Penanaman

Modal Sumatera Barat adalah pengumpulan dan analisis terhadap data-data penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat yang terealisasi di tahun 2019 dimana tujuannya adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang penanaman modal yang *up to date* dan informatif bagi pengguna Buku Data Perkembangan Modal Sumatera Barat sebagai dasar untuk perencanaan, pengembangan, pengendalian dan penyusun kebijakan daerah mengenai penanaman modal serta terlaksananya Konsolidasi Data Realisasi Penanaman Modal Provinsi karena realisasi penanaman modal merupakan salah satu kinerja yang dibebankan kepada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.

- Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1 dokumen tentang Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat.
- Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah sebagai bahan dan pedoman bagi pengambil kebijakan.

3. Kerjasama Promosi dan Misi Investasi, dukungan anggaran untuk kegiatan Koordinasi dan Misi Investasi ini adalah sebesar Rp. 197.217.200,- dan dapat direalisasikan keuangan sebesar Rp. 186.456.285,- atau (94,54%), serta realisasi fisik tercapai 100%. Kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa anggaran pada belanja Bantuan Transportasi Narasumber serta peserta di dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:
 - Mengkoordinasikan berbagai sektor baik hulu maupun hilir terkait dalam hal promosi dan misi investasi yang akan dilakukan baik dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Calon Investor.
 - Memfasilitasi para pengusaha/calon investor/dunia usaha yang berminat ke daerah tempat tujuan rencana investasi.
 - Memfasilitasi misi investasi dari luar ke Sumatera Barat dalam bentuk koordinasi, pendampingan maupun pertemuan sesuai kebutuhan.

➤ Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya koordinasi promosi dan misi investasi dengan kabupaten/kota serta calon investor Jumlah calon investor yang difasilitasi kelokasi rencana investasi sebanyak 2 calon Investor serta calon investor yang menyatakan minat investasi sebanyak 8 calon investor. Dengan capaian kinerja fisik sebesar 125% dari target 8 calon investor yang ditetapkan. Adapun calon investor yang menyatakan minat dan menunjukkan keseriusannya untuk, yaitu:

N O	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	MINAT KERJASAMA	ALAMAT/ HANDPHONE
1	2	3	4	5
1.	YULISA BEDSHET	FASHION BEDSHET DAN LENAN RUMAH TANGGA	FASHION BEDSHET DAN LENAN RUMAH TANGGA	PERUMNAS BELIMBING 085342629595
2.	APRILDA SUMTIMBUL	SULAMAN	SULAMAN	SOLOK SELATAN 085375536009
3.	ATILLA MAJIDI	KOPI	KOPI DAN OLAHAN KOPI	SANGIR SOLOK SELATAN 082284450068
4.	AISYAH SULAMAN	SULAMAN	SULAMAN	BANUHAMPU AGAM 082387500488
5.	SAGA LESTARI	- RENDANG - CETAK BATAKO SEMEN	- RENDANG - CETAK BATAKO SEMEN	LASI AGAM 085263048132
6.	LAURA KSU PULAU HARAPAN	- PENGOLAHAN IKAN - PENGOLAHAN MAKANAN	- PENGOLAHAN IKAN - PENGOLAHAN MAKANAN	TANJUNG RAYA AGAM 085376295966
7.	PT MINANG KAYO ABADI	KULIT	KULIT	PADANG PANJANG 081270238823
8.	KOPI PAK DAB	KOPI	KOPI	LUNANG PESISIR SELATAN 085363492945

4. **Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal**, dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 141.615.000,- dan

dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 140.701.500,- atau (99,35%). Untuk realisasi fisik dari kegiatan ini tercapai sebesar 100%.

- Maksud dan tujuan dari Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah melakukan dan mengikuti pertemuan Koordinasi Kelembagaan Investasi Daerah dalam lingkup Provinsi dan Nasional untuk bertukar Informasi serta mencari Solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan kegiatan investasi daerah.
- Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi program/kegiatan penanaman modal pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh rumusan rekomendasi terkait permasalahan/kendala dibidang perencanaan dan kebijakan, promosi, pengendalian dan pembinaan penanaman modal serta pelayanan perizinan tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hasil kegiatan ini adalah terciptanya harmonisasi perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional sebanyak 4 rumusan terkait perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal.

- Koordinasi dan kerja sama aktif dalam penyediaan data dan informasi terkait penanaman modal dan sumbangsih pemikiran lainnya antar bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan.

- 5. Gelar Potensi dan Temu Usaha**, dukungan anggaran untuk kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha ini adalah sebesar Rp. 554.963.300,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 551.505.695,- atau (99,10%), sedangkan realisasi fisiknya sebanyak 10 calon investor atau tercapai 142,86%, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 7 calon investor.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

- Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka mempromosikan sektor unggulan sebagai peluang investasi dalam suatu pertemuan dengan para calon investor.
- Menarik minat calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di Sumatera Barat.

Penyelenggaraan dari kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha adalah merupakan kegiatan pertemuan koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi bersama Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi peluang investasi dengan para pengusaha perantau Minang, Asosiasi yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi, calon investor baik nasional maupun internasional.

Kegiatan ini telah melakukan fasilitasi kepada calon investor yang pelaksanaan bersamaan dengan pelaksanaan Sumbar Expo di Medan.

- Keluaran dari kegiatan ini dapat dilaksanakan dan dapat dicapai sesuai target yaitu 1kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 100 orang dimana pelaksanaannya bersamaan dengan pelaksanaan Sumbar Expo di Medan yang menghadirkan 4 narasumber dari kabupaten/kota,
- Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketertarikan beberapa calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat, yakni:

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Minat Kerjasama
1	2	3	4
1.	Mayra Andrea (Indonesia Jordan Business Council) IJBC	IJBC	Kopi dan Maining
2.	I Gede Hasan	Travel	Wisata Kuda
3.	A.A. Gym	Pendidikan	Pendidikan Islami
4.	Joy	Pupuk	Industri Hilir Pupuk Organik
5.	Putrama Alkhairi	Pupuk	Industri Hilir Pupuk Organik
6.	PT. Nusantara Siana eEco Solusi	Energi Efisiensi dan Energi Terbarukan	Pengolahan Sampah menjadi Methanol
7.	Lewu Itah Organization	Obat-Obatan	Minyak Atsiri
8.	GTA LINH	Travel	Pariwisata
9.	Eric James	Energy	Geothermal, Hydropower dan Energy Development
10.	Che Maziah Hamid	Travel	Tours and Travel

6. **Promosi Investasi**, dukungan anggaran untuk kegiatan Promosi Investasi ini adalah sebesar Rp. 2.550.656.320,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 2.527.953.950,- atau (99,10%) dan capaian fisiknya sebesar 115,79%. Kinerja keluaran hasil melebihi target yang direncanakan yakni 22 event promosi yang diikuti baik dalam negeri maupun luar negeri dari 19 event promosi yang diikuti baik dalam negeri maupun luar negeri yang direncanakan.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan Promosi Investasi ini adalah agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha/investor sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan investasi. Disamping itu juga untuk menarik minat calon investor yang ingin berinvestasi serta membangun citra yang dapat menimbulkan kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan yang menguntungkan.
- Keluaran dan outputnya dari kegiatan Promosi Investasi terlaksananya keikutsertaan Sumatera Barat dalam 22 event promosi baik dalam dan luar negeri berupa forum dan business meeting. Calon investor yang menyatakan ketertarikannya untuk menanamkan investasinya di Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Minat Kerjasama
1	2	3	4
1.	Kishi Group	Penelitian dan Pengembangan Sintetis, di Berbagai Bidang Usaha Lain	Pengolahan Limbah Medis dan Rumah Tangga, Peternakan dan Perikanan
2.	Enersel Engine Company	Energy, Engine	Renewable Energy
3.	Centunion	Konstruksi Energy, Chemical dan Pengolahan Makanan	Proyek Infrastruktur
4.	AsFin (Emerging Markets Advisors	Perbankan, Hotel dan Pertanian	Data Investasi Publik
5.	Global World Energy OY	Energy	Pengolahan Limbah dan Ikan
6.	Bucharest	Kesehatan	Pencegahan Kanker
7.	OAV (German Asia – Pasific Business Association)	Pariwisata dan Energy	Geopark, Kawasan Wisata Bahari dan Industri Hilir Minyak Atsiri

8.	Shwe Taung Development Co. Ltd	Perhotelan	Perhotelan dan Industri Hilir (Rokok)
9.	Tomo Engineering	Energy	Kelapa Sawit, Bio Energy, Minyak dan Gas
10.	Power Energy	Energy	Solar Energy
11.	Lewu Itah Organization	Minyak Atsiri	Hilir Minyak Atsiri
12.	GTA LINH Travel	Travel	Pariwisata
13.	Zenith Real Estate Group	Wisata	Pariwisata
14.	Eric James Company	Energy	Geothermal, Hydropower, Energy Development
15.	Civil Service College Singapore	Perguruan Tinggi	Investasi Pendidikan
16.	Akmaziah Mobility Travel	Tour and Travel	Pariwisata
17.	Tour SDN BHD	Tour and Travel	Pariwisata
18.	Pound (Thailand)	Perkebunan	Kopi
19.	Mousa	Perkebunan	Jahe dan Makanan
20.	Arie (Jawa)	Energy	Pembangkit Listrik Tenaga Surya

- 7. Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi**, dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi ini adalah sebesar Rp. 37.584.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 33.612.000,- atau (89,43%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa anggaran pada belanja honorarium tenaga ahli/Instruktur/narasumber, Belanja Bantuan Transportasi Narasumber di dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi ini adalah pertemuan DPM & PTSP Provinsi dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang menghadirkan Narasumber dari BKPM RI terkait bagaimana koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara BKPM RI dengan DPM & PTSP Provinsi dan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, membahas berbagai permasalahan dan solusi terkait investasi di Sumatera Barat serta strategi promosi yang tepat sesuai dengan kondisi setiap daerah di Sumatera Barat.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi kegiatan ke Kab/kota, antara lain :

- Kab. Pesisir Selatan tgl. 14 s.d 15 Mei 2019
- Kab. Sijunjung tgl. 21 s.d 22 Mei 2019

- Kab. 50 Kota tgl. 22 s.d 23 Agustus 2019
- Kab. Agam tgl. 27 s.d 28 Agustus 2019
- Kab. Padang Pariaman tgl. 11 September 2019

8. Forum Investasi Sumatera Barat, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 115.301.800,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 102.808.450,- atau (89,16%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa anggaran pada belanja honorarium tenaga ahli/Instruktur/narasumber, Belanja Bantuan Transportasi Narasumber di dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan.

- Maksud dari kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat yaitu sebagai wujud tanggung DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat untuk menyelesaikan permasalahan investasi sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan juga akhirnya akan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat dan dapat membantu para investor agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan yang berarti.
- Tujuan kegiatan adalah untuk mengakomodir segala permasalahan yang dihadapi dihadapi oleh Perusahaan, DPM & PSTP Provinsi, Kab/Kota dalam menghadapi permasalahan investasi dan sebagainya untuk dicarikan solusi pemecahannya.
- Hasil Penyelenggaraan Forum Investasi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan tema " Peluang – peluang Investasi di sektor industri di Sumatera Barat ", diperoleh rumusan sebagai berikut :
 - a. Perlunya prcepatan pelayanan perizinan dimana adanya perubahan sistim untuk mempercepat pelayanan perizinan bagi investor, termasuk izin di sektor industri .
 - b. Perlunya membuat forum yang mempertemukan calon investor dan pelaku usaha.
 - c. Adanya permasalahan invesasi seperti permasalahan perizinan, permasalahan lahan dan permasalahan yang berhubungan

dengan deregulasi/kebijakan dapat diselesaikan dengan adanya Online Single Submission (OSS)

- d. Harus adanya jaminan Pemerintah untuk pemasaran, hal ini di perlukan untuk penyemangat petani lebih bergairah.
- e. Sektor industri termasuk salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian.

9. Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 165.672.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 163.170.870,- atau (98,49%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kegiatan ini dimaksudkan memberikan alternatif yang tepat dalam berinvestasi dimana dilakukan study kelayakan teknis, pasar dan finansial agar dapat memberikan informasi mengenai kelayakan teknis atas pasar, finansial di Provinsi Sumatera Barat bagi Investor. Khusus untuk Tahun 2019 Study yang dilakukan adalah pada sektor industri Minyak Nilam di Pasaman Barat. Dan Tujuan kegiatan ini adalah mengoptimalkan penghasilan petani serta meningkatkan taraf hidupnya.

10. Penyelesaian Permasalahan Investasi, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi ini adalah sebesar Rp. 60.451.600,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi sebesar Rp. 58.450.140,- atau 96,69%, serta capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi sesuai target yang direncanakan yaitu 6 perusahaan PMA dan PMDN.

Maksud dari kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Sumatera Barat, dan DPM&PTSP Prov. Sumbar beserta DPM&PSTP di Kabupaten/Kota merupakan OPD yang bertanggung jawab atas keamanan dan nyaman kegiatan investasi PMA/PMDN yang menjadi kewenangan masing-masing yang diharapkan dapat membantu para penanam modal agar dapat merealisasikan investasinya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan atau kendala yang berarti.

Tujuan kegiatan adalah agar permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMDN/PMA di Kabupaten/Kota khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya dapat difasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu Tim koordinasi penanaman modal yang melibatkan OPD/Instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

➤ Keluaran atau output dari kegiatan ini:

1. Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat yang difasilitasi permasalahan dalam Penanaman Modal sebanyak 6 Perusahaan PMA/PMDN.
2. Dari 6 perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya semuanya dapat diselesaikan.

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1	2	3
1.	CV. Batu Tongga	Pertambangan Batuan
2.	PT. Spectra Sun Energy	Pertambangan Batuan
3.	PT. Taruko Putra Nusantara	Pertambangan Batuan
4.	CV. Putra Karya Mandiri	Pertambangan Batuan
5.	PT. Dempo Sumber Energy	PLTMH
6.	Iswindiarti (Perseorangan)	-

➤ Hambatan didalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada yang berarti, namun dukungan anggaran untuk penyelesaian permasalahan investasi sangat dibutuhkan.

11. **Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat**, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat ini adalah sebesar Rp. 145.357.000,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat sebesar Rp. 142.563.920,- atau 98,08%, serta capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat sesuai dengan target yang direncanakan.

- Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan data dan informasi peluang investasi prioritas Sumatera Barat. Serta tujuan kegiatan ini adalah menyusun profil peluang investasi yang akan ditawarkan ke investor, identifikasi kondisi objektif potensi investasi secara akurat dan layak ditawarkan kepada investor serta mengetahui kelayakannya.
- Keluaran dari kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat ini adalah tersusunnya buku profil dan peluang investasi Provinsi Sumatera Barat dengan hasil cetakan sebanyak 450 buah buku.

Adapun hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan presentasi tentang peluang investasi yang ada di Sumatera Barat yang akan ditawarkan kepada calon investor serta materi promosi investasi.

12. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal, dukungan anggaran untuk kegiatan ini di tahun 2019 adalah sebesar Rp. 42.100.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar 92,01% atau sebesar Rp. 38.734.200,-.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal ini adalah memperkenalkan dan mempromosikan Sumatera Barat kepada seluruh pihak baik dalam dan luar negeri serta memberikan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang ada di Sumatera Barat agar diketahui oleh Investor sehingga nantinya menjadikan Sumatera Barat menjadi tujuan investasi.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah penyebaran informasi tentang penanaman modal yang terjadi di Sumatera Barat melalui Media baik Nasional maupun lokal serta media elektronik dan digital.

13. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal, dukungan anggaran untuk kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal ini adalah sebesar Rp. 83.180.900,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan ini mencapai Rp. 79.894.200,- atau (96,05%), dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan updating sistem informasi spasial penanaman modal ini adalah merupakan salah satu kegiatan dalam membantu mendorong pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi spasial penanaman modal yang lebih diarahkan pada pengembangan dan peningkatan akses

informasi sumber daya alam, penataan data dan informasi yang meliputi potensi dan peluang investasi, pembangunan dan pengembangan basis data spasial serta terwujudnya jaringan sistem informasi pada tingkat regional/provinsi yang terdiri dari peta kesesuaian lahan, status hutan dan peta investasi existing.

- Keluarannya adalah membuat peta dan database serta sistem informasi spasial sebanyak 1 sektor yakni di sektor pariwisata.
- Hasil (outcome) kegiatan ini adalah terupdatenya sistem informasi Spasial Penanaman Modal sebanyak 1 sektor.

14. Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah, dukungan anggaran untuk kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini adalah sebesar Rp. 112.001.050,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 111.104.800,- atau (99,20%). Dan realisasi fisiknya sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100%.

- Maksud dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan untuk meningkat dan mengembangkan usaha dalam sebuah Forum Komunikasi Usaha Daerah diantara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan para pelaku usaha. Forum ini bertujuan untuk mencari solusi dan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha untuk menghadapi tantangan kendala dan hambatan dalam meningkatkan dan megembangkan dunia usaha di Sumatera Barat.
- Keluaran (output) dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini adalah terlaksananya forum komunikasi usaha daerah dengan jumlah peserta 100 orang.
- Hasil (outcome) dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah adalah adanya usulan dasar rekomendasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi daerah tentang kemitraan Usaha di kalangan pelaku usaha di daerah.

B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan program ini adalah sebagai berikut :

1. **Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi**, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 406.740.400,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 390.378.480,- (95,98%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi dilaksanakan untuk mendukung kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP serta pelayanan secara elektronik dengan didukung komputer jaringan dan perangkat komputer yang baik yang diharapkan mempercepat penyelenggaraan perizinan kepada masyarakat.
2. **Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu**, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 115.579.780,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 114.369.400,- atau sebesar (98,95%), sedangkan realisasi fisiknya melebihi target yang ditetapkan sebesar 140% dari 15 permasalahan perizinan yang ditargetkan dapat direalisasikan sebanyak 21 permasalahan perizinan. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu dilaksanakan terkait laporan permasalahan yang muncul dalam pelayanan perizinan yang dilakukan dalam bentuk mediasi terhadap pengaduan izin yang bermasalah.
 - Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi disaat investor mengurus perizinan yang ada di bidang Perizinan dan Non Perizinan.
 - Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan tumbuhnya ekonomi Sumatera Barat dengan mensukseskan investasi Sumatera Barat dimana salah satunya adalah dengan memfasilitasi investor dalam percepatan pengurusan izin dimaksud.
 - Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi dan mediasi permasalahan pengurusan izin dari 15 yang ditargetkan dapat difasilitasi sebanyak 21 permasalahan
 - Dan Hasil dari kegiatan ini adalah termediasinya permasalahan dalam pengurusan perizinan yang dilakukan oleh calon investor.

3. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 155.096.240,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 147.680.600,- (95,22%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dilaksanakan bertujuan untuk :

1. Mengsinkronkan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan dan standar pelayanan dan standar operasional pelayanan;
2. Menghimpun berbagai masalah dan mencari pemecahannya; dan,
3. Mengevaluasi perkembangan dari pelimpahan kewenangan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan.

4. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.176.886.900,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.146.095.086,- atau (97,38%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dilaksanakan untuk 660 orang pelaku usaha, tokoh masyarakat, KAN, LKAAM, Camat, Walinagari dan aparatur DPM & PTSP kabupaten/kota se Sumatera Barat yang dilaksanakan dalam beberapa angkatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan adanya perizinan cepat, mudah, transparan dan pasti;
- Sarana pembelajaran dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, kesejahteraan sehingga masyarakat mau dan mapu berperan serta dalam setiap program pemerintah.

5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 326.573.500,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 320.109.335,- atau (98,02%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan

target yang direncanakan. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dilakukan 2 kali dalam tahun 2019 sesuai dengan evaluasi Menpan. Dari 2 kali pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan diperoleh kinerja unit pelayanan “ **Sangat Baik** ” dengan interval nilai kumulatif sebesar **81,75**. Dan setelah dikonversikan didapatkan nilai akumulasi IKM sebesar **3,27**. Kinerja dari Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan sebesar **97,61%** dibandingkan dengan target sebesar **3,35**.

Faktor yang menghambat pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain :

1. Help Desk (meja pengaduan) yang tidak tersedia dan mudah dilihat pada ruang tunggu layanan;
 2. Petugas Pengaduan yang tidak standby (berada setiap hari) di ruang layanan;
 3. Kompetensi petugas di FO yang masih kurang, yang seharusnya PNS yang sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan di posisi FO;
 4. Petugas Administrator dan Pengawas yang tidak berada di ruangan layanan selama waktu pelayanan;
 5. Tim Teknis PTSP yang masih berkantor di OPD teknis masing-masing.
- 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.003.193.750,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 2.000.628.258,- atau (99.87%) sedangkan untuk realisasi fasilitas penerbitan izin dan non izin yang ditargetkan melampaui realisasinya 3.174 izin/non izin dari 1.500 izin/non izin yang ditargetkan atau sebesar 211,60%, dan untuk penyelesaian izin/non izin sesuai dengan SOP adalah sebesar 82,51% dari target sebesar 82% atau sebesar 100,62%.
- Maksud dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.

- Tujuan dari kegiatan pelaksanaan Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP) adalah untuk membantu masyarakat / pelaku usaha / investor / penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi mengenai penanaman modal.

Ruang lingkup kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan bagi perusahaan/perorangan yang berlokasi di Sumatera Barat, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Melayani permohonan perizinan berusaha sesuai kewenangan;
 2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dari si pemohon;
 3. Melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan yang diajukan pemohon;
 4. Melakukan peninjauan lapangan, koordinasi dan rapat dengan instansi terkait bila diperlukan;
 5. Melaksanakan proses permohonan perizinan penanaman modal melalui SPIPISE dan OSS;
 6. Melaksanakan proses permohonan perizinan Sektor Perdagangan berupa Angka Pengenal Impor (API) umum maupun produsen yang berbasis Website (internet); dan
 7. Menerbitkan dokumen perizinan berusaha.
- Keluaran Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) keluaran yaitu:

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP tahun 2019 telah diterbitkan izin dan non izin sebanyak 3.174 izin/rekomendasi melampaui target sebesar 211,60% (target: 1.500 izin/rekomendasi).
 - Hasil dari kegiatan yaitu persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu dapat terealisasi sebesar 82,51% atau sebesar 100,62% (target 82%).

7. **Penilaian Standar Mutu Perizinan**, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 34.285.000,- atau sebesar (97,96%), sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Kegiatan Penilaian Standar Mutu Perizinan tahun 2019 dilaksanakan terkait untuk Surveillance Manajemen Mutu SNI ISO dari 9001:2008 menjadi 9001:2015 yang berlaku sampai dengan 01 Agustus 2021.



Secara umum permasalahan yang masih terjadi dalam penanaman modal di Sumatera Barat yang teridentifikasi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Pelayanan terhadap penanaman modal (investor) masih belum optimal, disebabkan :

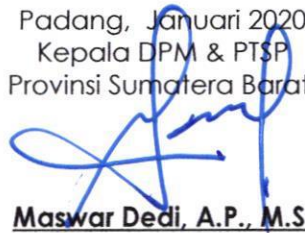
1. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, ini terlihat dari Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu dan hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang masih belum menunjukkan hasil yang membaik dibandingkan tahun 2018, antara lain disebabkan oleh :
 - a. Help Desk (meja pengaduan) yang tidak tersedia dan mudah dilihat pada ruang tunggu layanan;
 - b. Petugas Pengaduan yang tidak standby (berada setiap hari) di ruang layanan;
 - c. Kompetensi petugas di FO yang masih kurang, yang seharusnya PNS yang sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan di posisi FO;
 - d. Petugas Administrator dan Pengawas yang tidak berada di ruangan layanan selama waktu pelayanan;
 - e. Tim Teknis PTSP yang masih berkantor di OPD teknis masing-masing.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti area parkir sehingga kepuasan masyarakat dalam pengurusan Perizinan dan Non Perizinan belum optimal.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kualitas yang ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang masih membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya di bidang Pelayanan.
4. Perubahan Kebijakan Pemerintah terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang mengakibatkan perubahan prosedur penyelenggaraan Perizinan.

5. Standar Operating Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang masih perlu dilakukan kajian dan perubahan dengan proses pertimbangan teknis dari OPD teknis terkait perubahan kebijakan dan aturan dari Kementerian Teknis terkait.
6. Masih kurangnya infrastruktur berupa penyediaan dan perbaikan jalan, jaringan komunikasi dan ketersediaan energi.
7. Masih belum sinerginya kebijakan dan program pengembangan investasi sesuai dengan sektor/subsektor dan komoditas yang berdaya saing tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan investasi dan penanaman modal, dapat disolusikan antara lain :

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti area parkir sehingga kepuasan masyarakat dalam pengurusan Perizinan dan Non Perizinan belum optimal.
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kualitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya dibidang Pelayanan.
3. Melakukan Revisi terkait Standar Operating Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) atas kajian dan perubahan serta proses pertimbangan teknis dari OPD teknis terkait perubahan kebijakan dan aturan dari Kementerian Teknis terkait.
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur berupa penyediaan dan perbaikan jalan, jaringan komunikasi dan ketersediaan energi.
5. Mensinerginya kebijakan dan program pengembangan investasi sesuai dengan sektor/subsektor dan komoditas yang berdaya saing tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Padang, Januari 2020
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat,



Maswar Dedi, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19740618 199311 1 001